

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, tetapi dalam pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, budaya dan diberikan melalui prosedur atau mekanisme tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Pada prinsipnya pembebasan bersyarat harus memenuhi segala persyaratan administratif dan substantif sebagai bentuk kewajiban guna mendapatkan hak bebas bersyarat apabila tidak memenuhi syarat tersebut seharusnya dapat pembatalan dan pencabutan pembebasan bersyarat yang telah diberikan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular dan Henry J Gunawan menjadi kontroversi dan polemik karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ada. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembebasan bersyarat terhadap terpidana tindak pidana serta tindakan apa yang dapat dilakukan apabila pemberian pembebasan bersyarat tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan serta pertimbangan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di lembaga pemsyrakatan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan penerapan pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyrakatan *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Penerapan pembebasan bersyarat terhadap terpidana Robert Tantular dan Henry J Gunawan tidak sesuai dengan aturan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyrakatan *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sehingga keputusan tersebut cacat secara hukum dan pencabutan pembebasan bersyarat seharusnya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemsyrakatan. Pertimbangan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya syarat administratif dan mengabaikan syarat substantif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengacu kepada surat usulan/ rekomendasi yang diajukan oleh lembaga pemsyrakatan dan hal tersebut menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia karena syarat substantif tidak terpenuhi secara kumulatif

ABSTRACT

Parole is a right for every inmate, but in granting parole must take into account social, economic, political, cultural points of view and be granted through certain procedures or mechanisms as stipulated in the legislation.. In principle parole must meet all administrative and substantive requirements as a form of obligation to obtain parole rights if it does not meet the requirements should be able to cancel and revoke the parole that has been granted. The parole of Robert Tantular and Henry J Gunawan became controversial and polemical because they were deemed incompatible with the provisions of the legislation. The purpose of this research is to know and analyze the application of parole to the criminal code and what actions can be taken if the granting of parole is not in accordance with the regulations that have been enacted under the Criminal Code in connect with Law No. 12/1995 On Correctional and Legal consideration of the ministry of law and human right in issuing parole papers.

The method of approach used in this discussion is a normative juridical method. Normative juridical method is a study that emphasizes the science of law and conducts a positive legal inventory related to the implementation of granting parole to inmates in correctional institutions.. The research specification used is a descriptive analysis that describes and analyzes the issue of the application of parole based on government regulation No. 99 of 2012 on the second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for The Implementation of The Rights of Citizens of The Juncto Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 on the Terms and Procedures of Granting Remission, Assimilation, Family Leave, Parole, Leave Ahead of Release, And Conditional Leave

The application of parole to convicted Robert Tantular and Henry J Gunawan is not in accordance with the parole rules as stipulated in Government Regulation No. 99 of 2012 on the Terms and Procedures for The Exercise of The Rights of Correctional Residents Juncto Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 On The Terms and Procedures of Granting Remission, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Parole and Parole so that the decision is legally flawed and the revocation of parole should be made by the Head of correctional. The legal considerations of Kementerian Hukum and Human Rights are only administrative requirements stratified and ignore substantive terms. The Ministry of Justice and Human Rights refers only to the letter of proposal/ recommendation submitted by the correctional institution and it sets a bad precedent in law enforcement in Indonesia because the substantive syarat is not met cumulatively

Keywords : Procedure, Parole, Convict Rights